

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

Christy Natalia Lewier, Ch. Heni Kurniawan

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Babarsari 43-44 Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling* dengan kriteria yaitu para Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Klaten. Sedangkan yang tidak termasuk dalam Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan kriteria telah menduduki jabatan struktural tertentu minimal selama 2 (dua) tahun.

Data dikumpulkan dari kuesioner yang dikirimkan kepada 217 pejabat struktural yang bekerja pada SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Klaten yang meliputi kepala badan/dinas/ instansi, sekretaris/ kabid/ kabag, maupun kasubid/kasubbag/kasubdis/kasie. Jumlah yang dapat digunakan untuk penelitian ini adalah 127 kuesioner sedangkan 90 kuesioner lainnya tidak dapat diolah lebih lanjut karena dianggap gugur yang disebabkan kuesioner tersebut tidak dikembalikan, dan diisi oleh pihak yang tidak berkompeten.

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda dengan *software* SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara individu (parsial) maupun secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci : Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini laporan yang mengandung informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan juga laporan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut (Steccolini, 2002 dalam Aliyah dan Nahar, 2012). Disamping melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif juga tergantung pada kemudahan dari seseorang dalam memperoleh informasi terkait dalam laporan keuangan. Dimana masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan

informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002).

Namun dalam kenyataannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan banyak permasalahan pada pengelolaan keuangan pemerintah saat melakukan pemeriksaan atau audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menunjukkan lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, LKPD Kabupaten Klaten mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini dikarenakan data yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Pemerintah Kabupaten Klaten tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Fakta tersebut menunjukkan buruknya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah yang meningkatkan peluang kebocoran dan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah.

Penelitian berkaitan dengan penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah telah dilakukan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian Wahida (2015) dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara”. Penelitian tersebut membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara.

Peneliti termotivasi untuk menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Wahida (2015), karena dalam penelitian tersebut hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara individu maupun secara bersama-sama atau serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, karena ada kesamaan permasalahan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yaitu penyajian laporan keuangan masih mengalami kendala yang dibuktikan melalui opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, dan laporan keuangan belum dipublikasikan secara luas melalui media massa seperti internet, sehingga masyarakat sulit mengakses atau memperoleh informasi laporan keuangannya.

Penelitian ini dilakukan di lokasi yang berbeda dengan lokasi penelitian Wahida (2015) yaitu Kabupaten Klaten. Alasan dipilihnya Kabupaten Klaten adalah opini WDP atas LKPD Kabupaten Klaten selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Selain itu, penelitian mengenai penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ini belum pernah dilakukan di Kabupaten Klaten.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang penelitian, dapat dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?

2. Apakah aksesibilitas penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?
3. Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahida (2015) yang menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara individu maupun secara bersama-sama atau serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan objek penelitian yang berbeda yaitu di SKPD Kabupaten Klaten.

II. Landasan Teori dan Pembentukan Hipotesis

A. Landasan Teori

1. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002).

2. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koester, 2002 dalam Sande, 2013). Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana 2006).

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim, 2007).

B. Hipotesis

1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010). Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Nurhayani (2013), menyatakan penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ha₁: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apakah artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik. Sande (2013) menyatakan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ha₂: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordian, 2010). Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apakah artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Aliyah dan Nahar (2012), serta Wahida (2015) menyatakan penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha₃: Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

III. Metode Penelitian

A. Obyek, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Obyek penelitian ini adalah SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Klaten.
2. Sampel dalam penelitian ini adalah para kepala SKPD, Sekretaris pada SKPD, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian.
3. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling*. Pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu (Jogiyanto, 2010).

Sampel dalam penelitian ini adalah para kepala SKPD , Sekretaris pada SKPD, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian. Adapun kriteria yang digunakan adalah para Penjabat Pengelolaan Keuangan Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Klaten.Sedangkan yang tidak termasuk dalam Penjabat Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan kriteria telah menduduki jabatan struktural tertentu minimal selama 2 (dua) tahun.

B. Operasionalisasi Variabel

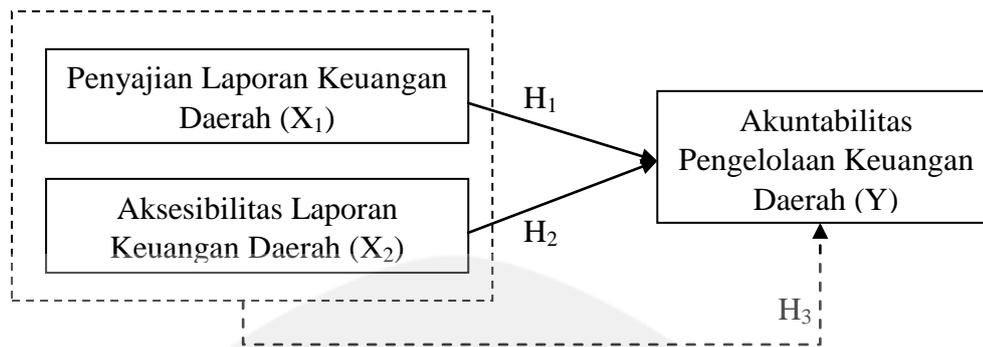
Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah (X₁), dan aksesibilitas laporan keuangan daerah (X₂), yang dioperasionalkan sebagai berikut:

Tabel 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Dimensi	Skala
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X ₁)	Penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami 	Skala Likert 1-5
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X ₂)	Kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder. (Wahida, 2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbuka di media massa 2. Mudah diakses 3. Ketersediaan informasi 	Skala Likert 1-5
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD. (Halim, 2007)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum 2. Akuntabilitas proses 3. Akuntabilitas program 4. Akuntabilitas kebijakan 	Skala Likert 1-5

C. Model Penelitian

Model penelitian adalah gambaran secara teoritis yang menjelaskan hubungan antar variabel (Jogiyanto, 2010). Model penelitian dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Model Penelitian

D. Teknik Analisis Data

1. Uji Pendahuluan

a. Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment Pearson. Butir kuesioner dikatakan valid jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, dan sebaliknya.

b. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Kuesioner dikatakan reliabel jika nilai koefisien *Cronbach's Alpha* $> 0,60$, sebaliknya.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data dalam variabel penelitian dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi hitung lebih besar dari taraf signifikan (α) = 0,05, sebaliknya.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilihat berdasarkan nilai VIF dan nilai *tolerance*. Variabel independen dalam penelitian dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika nilai VIF kurang dari 10, serta nilai *tolerance* lebih dari 0,1.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Pedoman yang digunakan dalam uji *Glejser* untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas ialah jika variabel independen tidak berpengaruh signifikan pada taraf signifikansi 5% (0,05) terhadap residual absolut, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Nilai t (Uji Parsial)

Uji t merupakan uji untuk mengetahui pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah jika nilai signifikansi hitung lebih kecil dari taraf signifikan (α) = 0,05, sebaliknya.

b. Uji Nilai F (Uji Simultan)

Uji F merupakan uji untuk mengetahui pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah jika nilai signifikansi hitung lebih kecil dari taraf signifikan (α)= 0,05, sebaliknya. Selain itu uji F digunakan untuk memprediksi model regresi dalam penelitian ini agar memenuhi *goodness of fit* yang artinya bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005).

IV. Analisis Data dan Pembahasan

A. Penyebaran Kuesioner

Kuesioner yang disebarakan kepada 31 SKPD Kabupaten Klaten sebanyak 217 kuesioner. Dari 217 kuesioner tersebut, sebesar 59% (127 kuesioner) dapat dianalisis lebih lanjut, sedangkan sisanya 41% (90 kuesioner) tidak dapat diolah lebih lanjut karena dianggap gugur yang disebabkan kuesioner tersebut tidak dikembalikan, dan diisi oleh pihak yang tidak berkompeten.

B. Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif masing-masing variabel penelitian dikelompokkan ke dalam tiga kategori berdasarkan skor rata-ratanya yaitu skor rata-rata (*mean*) dari 1,00 - 2,33 termasuk dalam kategori jelek; Skor rata-rata (*mean*) dari 2,34 - 3,66 termasuk dalam kategori cukup baik; serta Skor rata-rata (*mean*) dari 3,67 - 5,00 termasuk dalam kategori baik, yang disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Deskripsi Variabel Penelitian Berdasarkan Nilai *Mean*

No	Variabel	Nilai rata-rata (<i>Mean</i>)	Kategori
1	Penyajian Laporan Keuangan Daerah	3,89	Baik
2	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	3,98	Baik
3	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	3,91	Baik

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semuanya termasuk dalam kategori baik.

C. Pengujian Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan metode *Pearson Product Moment*. Butir pernyataan dalam masing-masing variabel penelitian dikatakan valid jika nilai *r* hitung > *r* tabel. Nilai *r* tabel untuk sampel penelitian sebanyak 127 adalah 0,174. Hasil uji validitas pada variabel penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diketahui memiliki nilai *r* hitung > 0,174 (*r* tabel), hal ini berarti masing-masing item/butir pertanyaan dalam semua variabel penelitian ini dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Semua butir pernyataan dalam seluruh variabel penelitian ini dinyatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Hasil uji reliabilitas disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	0,861	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	0,721	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0,912	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Hasil uji reliabilitas pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari seluruh variabel penelitian lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa semua butir-butir pernyataan yang ada pada variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, maupun dinyatakan seluruhnya reliabel atau dapat diandalkan.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, independen atau keduanya mempunyai sifat distribusi normal ataukah tidak. Dengan menggunakan uji statistik yang terdapat dalam uji hipotesis yaitu *Kolmogorof Smirnov* dapat diketahui apakah distribusi data normal atau mendekati normal. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikansi variabel sesuai dengan nilai residualnya sebesar 0,244. Hal ini membuktikan jika nilai signifikansi > 0,05 yaitu $0,244 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data berupa jawaban responden terkait variabel dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Pedoman yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dengan melihat nilai *Tolerance* dan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*). Model regresi dinyatakan tidak ada multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* > 0,10, dan nilai *VIF* < 10. Hasil uji multikolinearitas tercantum dalam Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Penelitian	<i>Tolerance</i>	VIF
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	0,687	1,456
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	0,687	1,456

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas seperti terlihat pada Tabel 4.12, dapat dijelaskan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas, karena nilai *tolerance* untuk semua variabel independen lebih dari 0,10, dan nilai *VIF* kurang dari 10. Hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model regresi tidak berkorelasi satu sama lain.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Pedoman yang digunakan dalam uji *Glejser* untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas ialah jika variabel independen tidak berpengaruh signifikan

pada taraf signifikansi 5% (0,05) terhadap residual absolut, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Penelitian	Probabilitas (Sig.)	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	0,861	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	0,721	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai probabilitas (sig.) semua variabel independen lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

E. Uji Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial (uji nilai t) dan simultan (uji F) dengan menggunakan analisis regresi berganda, seperti terlihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model Regresi	<i>Unstandardized Coefficients</i> (β)	t	Probabilitas (Sig.)
Konstanta (α)	3,622	2,026	0,045
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X_1)	0,226	4,281	0,000
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X_2)	0,989	10,103	0,000
Variabel Dependen (Y) : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah			

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Model persamaan regresi berganda dari hasil perhitungan sesuai Tabel 6 dapat dirumuskan yaitu $Y = 3,622 + 0,226X_1 + 0,989X_2$. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda tersebut dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini.

1. Uji Nilai t (Uji Hipotesis Parsial)

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah memiliki nilai t hitung = 4,281 lebih besar dari t tabel = 1,979, dengan signifikansi (sig.) sebesar 0,000, yang lebih kecil dari nilai signifikansi (α) yang ditetapkan yaitu 5% (0,05), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut berarti bahwa penyajian laporan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga hipotesis pertama (H_1) yang diajukan dalam penelitian ini terbukti (diterima).

b. Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki nilai t hitung = 10,103 lebih besar dari t tabel = 1,979, dengan signifikansi (sig.) sebesar 0,000, yang lebih kecil

dari nilai signifikansi (α) yang ditetapkan yaitu 5% (0,05), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut berarti bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga hipotesis kedua (H_2) yang diajukan dalam penelitian ini terbukti (diterima).

2. Uji Nilai F (Uji Hipotesis Simultan)

Pedoman yang digunakan dalam uji nilai F adalah apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Nilai F tabel dengan derajat kebebasan (df) = 2 ($n-k-1$ atau $127-3 = 124$) pada tingkat signifikan (α) = 0,05 sebesar 3,070. Hasil uji nilai F ini dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji Nilai F

F hitung	F tabel	Probabilitas (Sig.)	Kesimpulan
122,869	3,070	0,000	Model layak

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Hasil uji F pada Tabel 7 di atas memperlihatkan bahwa nilai F hitung = 122,869 > F tabel = 3,070 dengan nilai probabilitas = 0,000 < 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini diterima atau terbukti, atau dengan kata lain model regresi dalam penelitian ini memenuhi *goodness of fit* yang artinya bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) terlihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,665	0,659	1,978

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Tabel 8 memperlihatkan bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0,659. Hal ini berarti bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (variabel dependen) mampu dijelaskan oleh penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah (variabel independen) sebesar 65,9%, atau dengan kata lain penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Klaten sebesar 65,9%, sedangkan sisanya 34,1% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

F. Pembahasan

1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil uji hipotesis secara parsial (uji nilai t) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten. Hal tersebut berarti apabila penyajian laporan keuangan daerah semakin disusun secara lengkap, semakin dapat diselesaikan tepat waktu, semakin menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan di masa lalu, semakin jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan, semakin dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya, serta semakin dapat dipahami oleh pengguna karena dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas kemampuan pengguna, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah cenderung semakin baik pula, begitu sebaliknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini diterima. Hal tersebut sudah sesuai dengan hasil penelitian dari Sande (2013), dan Wahida (2015) yang menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil uji hipotesis secara parsial (uji nilai t) memperlihatkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten. Hal tersebut berarti apabila semakin dipublikasikan secara terbuka suatu laporan keuangan daerah melalui media massa, semakin mudah para pengguna memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah, semakin cepat dan mudah masyarakat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (*website*), informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah semakin dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta laporan keuangan daerah semakin dapat dipahami dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan daerah, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah cenderung semakin baik pula, dan sebaliknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini diterima. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Aliyah dan Nahar (2012), serta Sande (2013) yang mengungkapkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil uji hipotesis secara simultan atau bersama-sama (uji nilai F) memperlihatkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten. Hal tersebut berarti apabila penyajian laporan keuangan daerah semakin disusun secara lengkap, semakin dapat diselesaikan tepat waktu, semakin menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan di masa lalu, semakin jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan, semakin

dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya, serta semakin dapat dipahami oleh pengguna karena dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas kemampuan pengguna, maupun semakin dipublikasikan secara terbuka suatu laporan keuangan daerah melalui media massa, semakin mudah para pengguna memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah, semakin cepat dan mudah masyarakat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (*website*), informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah semakin dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta laporan keuangan daerah semakin dapat dipahami dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan daerah, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah cenderung semakin baik pula, dan sebaliknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini diterima. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Aliyah dan Nahar (2012), dan Wahida (2015) yang menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

V. Penutup

A. Kesimpulan

1. Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
3. Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, dan semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara individu (parsial) maupun secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Dari 217 kuesioner yang disebar ke dalam 31 SKPD Kabupaten Klaten, 30 diantaranya tidak dikembalikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kesibukan responden dan beberapa responden tidak bertemu secara langsung dengan peneliti. Selain itu, ada 60 kuesioner diisi oleh pihak yang tidak berkompeten yang bukan merupakan responden dalam penelitian ini dikarenakan peneliti menyebarkan kuesioner penelitian dengan cara menitipkannya kepada staf dari masing-masing pejabat SKPD Kabupaten Klaten, sehingga kemungkinan besar cenderung salah paham antara maksud peneliti dengan maksud dari staf, sehingga kuesioner tersebut salah sasaran.
2. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi jawaban melalui kuesioner yang diberikan sehingga kadang timbul perbedaan interpretasi atas maksud dan tujuan pernyataan.
3. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, penelitian ini hanya meneliti pada SKPD Kabupaten Klaten sehingga hasilnya hanya mencerminkan kondisi yang ada pada SKPD Kabupaten Klaten tersebut, dan tidak dapat digeneralisasi pada semua keadaan di SKPD Kabupaten Lain.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap dengan cara mendatangi langsung responden dalam proses penyebaran dan pengumpulan kuesioner serta melakukan wawancara secara langsung dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya dianjurkan meneliti pada subjek yang lain selain pejabat SKPD, dengan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah seperti misalnya variabel penyajian neraca daerah, sistem akuntansi keuangan daerah maupun tingkat keterbukaan pengelolaan, dan bisa mengambil sampel yang lebih banyak dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah dan Nahar. (2012). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama, Jepara.
- Diamond, Jack. (2002). *Performance Budgeting-Is Accrual Accounting Required?*. IMF Working Paper Fiscal Affairs Department, December, pp.1-31.
- Donaldson, Lex, dan Davis James, H. (1991), *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholders Return*. Australian Journal of Management, 16 (1) June, pp. 49-64.
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hehanussa, Salomi J. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*. Jurnal Unissula, 2 (1) Mei, hal.82-90.
- Jogiyanto, Hartono. M. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPF.
- Katz, Ellen. (2004). *Transparency in Government-How American Citizens Influence Public Policy*. Journal of Accountancy, 3 (2) June, pp. 1-2.
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo. (2002). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2 (1), hal.1-17.

- Mulyana, Budi. (2006), *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Tesis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayani, Hani. (2013). *Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survei Seluruh Dinas di Pemerintahan Kota Bandung)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Sande, Peggy. (2013). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Sumatera Utara.
- Shende, Suresh, dan Tony Bennet. (2004). *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. UN DESA March, pp.1-17.
- Sudrajat, Ajat, dan Ompusunggu, Arles Parulian. (2015). *Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak*. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, 2 (2) Desember, hal.193-202.
- Wahida, N. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.